

PENGEMBANGAN KOMUNITAS PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERTANIAN BERKELANJUTAN

Azwar Maulana

Program Vokasi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian,
Institut Pertanian Bogor

Email: azwarzwaripb3@gmail.com

Abstract

Community Empowerment in Sustainable Agricultural Development (Study at Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri). One of the duties of the nation is to provide the prosperity for the citizen through a development. The development is conducted by the government in order to reach the economic growth by utilizing all agriculture potentials and by organizing community development. In this study has the purpose is to know, describe and analyze the empowerment of the community in the village of Asmorobangun in sustainable agricultural development. Type of research is descriptive with qualitative approach data analysis uses Creswell's model. Asmorobangun Village has a resource potential that is needed can apply sustainable agriculture development for community welfare. Through empowerment which involves several stages such as enlightenment, capacity building, and enforcement, hereby, the awareness, capacity, skill and strength of the community can be improved to exploit all potentials. The support given to the community in sustainable agriculture development is already not maximum. Despite this support, there are factors constraining community empowerment in sustainable agriculture development. These constraints may come from community, very few numbers of agriculture counselor, natural resource inadequacy, and also weather factor at Asmorobangun Village such that the empowerment process cannot be made maximum.

Keywords: *Community empowerment; development; sustainable agriculture*

A. Pendahuluan

Salah satu tugas utama dibentunya suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap

sumber daya alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan berdampak kurang baik bagi lingkungan dan bagi keberlangsungan kehidupan. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mengeksploitasi lahan pertanian. Dampak positif yang dirasakan adalah mampu melakukan swasembada pangan pada tahun 1984. Sedangkan, dampak negatif yang dirasakan adalah ketergantungan terhadap pupuk anorganik dan terjadi penurunan kesuburan tanah. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Deptan (1995) menunjukkan bahwa sampai dengan Pelita IV, kadar bahan organik tanah sawah di Indonesia jika dibandingkan dengan keadaan pada Pelita I telah menurun menjadi tinggal sekitar 1,5 persen.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan pupuk anorganik maka diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah melakukan berbagai upaya proteksi untuk menjaga lingkungan dan lahan pertanian. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Sugandhy & Hakim (2007) pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memperhatikan lingkungan hidup, termasuk sumber daya dalam proses pembangunan serta menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup pada saat ini dan generasi yang akan datang. Sehingga pembangunan berwawasan lingkungan perlu memperhatikan lingkungan dan sumber daya sehingga pembangunan tidak hanya memperhatikan dampak pada satu sektor tetapi juga memperhatikan sektor lain.

Kabupaten Kediri masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu 47.786 Ha dari luas keseluruhan 138.605 Ha. Di Desa Asmorobangun yang merupakan desa yang memiliki produk unggulan cabai dan jagung serta memiliki potensi yang bagus untuk dilakukan pembangunan pertanian berkelanjutan. Potensi yang

dimiliki tidak hanya lahan yang luas namun juga sumberdaya ternak dan dukungan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya.

Masyarakat Desa Asmorobangun memiliki potensi namun juga memiliki kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan yaitu sumber daya manusia yang masih rendah, masih terdapat kelompok tani yang kurang aktif, permasalahan modal dan iklim juga berpengaruh atas usaha pertanian yang dijalankan sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk kemandirian masyarakat dan dapat keluar dari masalah yang dihadapi oleh petani. Pemerintah melindungi petani yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi masyarakat di Desa Asmorobangun sehingga perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Maka penulis merumuskan masalah (1) Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, (2) Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

Tujuan artikel adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, serta mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan. Manfaat penelitian sebagai sumbangan masukan dan pemikiran terkait dengan pengembangan konsep pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan dan memberikan masukan, informasi kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Masyarakat Desa Asmorobangun.

B. Tinjauan Pustaka

Definisi Administrasi Publik

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafri (2012) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas berpikir secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya.

Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg & A. Thomson dalam Syafri (2012) administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan sebuah kelompok yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat tiga inti dari pengertian tersebut, yaitu:

1. administrasi merupakan serangkaian kegiatan;
2. kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama kelompok;
3. kerjasama kelompok dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Definisi Pembangunan

Mardikanto & Soebiato (2013) mengatakan pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah juga perlu adanya partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Menurut Sugandhy & Hakim (2007) mengatakan pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan

Asdak (2012) mengatakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutnya secara ekologis, ekonomi dan sosial. Keambrokan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Martopo & Mitchell Sumarwoto dalam Sugandhy & Hakim (2007) mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah perubahan yang menuju kearah positif atau lebih baik didalam aspek sosial, ekonomi yang pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek ekologi atau lingkungan dan sosial dimana seluruh lapisan masyarakat bergantung kepada aspek lingkungan. Keberhasilan penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang dilakukan secara terpadu.

Pertanian Berkelanjutan

Salikin (2003) mengatakan pembangunan pertanian yang dimaksud adalah pembangunan pertanian dalam arti luas, meliputi bidang-bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pembangunan pertanian harus dilakukan secara seimbang dan

disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekankan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin.

Definisi pertanian berkelanjutan menurut Nasution dalam Salikin (2003) bahwa kegiatan pertanian dilakukan untuk memaksimalkan dampak sosial dari pemanfaatan sumber daya biologis dengan memelihara produktivitas dan efisiensi produksi komoditas pertanian yang dihasilkan, pertanian berkelanjutan juga memperhatikan pentingnya memelihara kualitas lingkungan hidup, dan menjaga produktifitas sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang.

Terdapat lima dimensi sistem pertanian berkelanjutan menurut Zamora dalam Salikin (2003) yaitu (1) ekologi; (2) kelayakan ekonomi; (3) kepastian budaya; (4) kesadaran sosial (5) pendekatan holistik.

Tujuan pertanian berkelanjutan menurut Manguiat dalam Salikin (2003) ada tujuh macam kegiatan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, yaitu: (1) meningkatkan pembangunan ekonomi; (2) memprioritaskan kecukupan pangan; (3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia; (4) meningkatkan harga diri; (5) memberdayakan dan memerdekakan petani; (6) menjaga stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, diperbarui); dan (7) memfokuskan tujuan produktifitas untuk jangka panjang. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat

Anwas (2013) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap

dapat meningkat. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato (2013) pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) membagi tiga proses pemberdayaan, pertama, tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kedua, tahap pengkapasitasan, tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Ketiga, tahap penyadaran pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Pemberdayaan Masyarakat Petani

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani pada Pasal 1 Ayat 2 tertulis pengertian pemberdayaan petani yang berbunyi “pemberdayaan petani adalah

segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”. Petani perlu diberikan perlindungan serta pemberdayaan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih sejahtera.

C. Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

1. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat Desa Asmorobangun akibat dari dampak negatif penggunaan pupuk anorganik pada masa revolusi hijau. Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mampu menjaga lingkungan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap penyadaran. Tahap ini masyarakat Desa Asmorobangun diberikan penyadaran melalui sosialisasi secara lisan dan demplot yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyadaran dilakukan dengan tujuan merubah mindset masyarakat tentang dampak pupuk anorganik dan manfaat pupuk organik. Sehingga, petani merubah perilakunya dengan menggunakan pupuk organik untuk lahan pertaniannya. Kedua, tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini masyarakat diberikan kapasitas atau kemampuan dan ketrampilan. Pelatihan diberikan baik untuk petani untuk mengolah limbah ternak dan limbah pertanian menjadi pupuk bokashi atau organik, dan limbah pertanian juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi.

Pelatihan juga diberikan kepada wanita tani untuk mengolah hasil pertanian menjadi makanan olahan berupa kripik. Pengkapasitasan organisasi juga dilakukan baik didalam Gapoktan maupun didalam kelompok tani. pengkapasitasan nilai yang dilakukan oleh Gapoktan adalah dengan membuat AD-ART (Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga) yang berfungsi untuk memenuhi hak dan kewajiban anggota. Ketiga, tahap pendayaan. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menerapkan pertanian berkebijutan, masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dan ketrampilan yang telah diberikan. partisipasi masyarakat yang lain juga akan mendukung dan pertanian berkelanjutan.

2. Aktor Pemberdayaan

Aktor pemberdayaan yang berperan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmorobangun adalah pegawai Dinas Pertanian Keupaten Kediri yang di wakili oleh Mantri Tani yang bertugas melakukan koordinasi program yang diberikan dari dinas dengan kelompok tani terkait dengan pelaksanaan program yang akan diberikan. Pelaksanaan program yang diberikan kepada kelompok tani maka akan didampingi oleh seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertugas sebagai pendampingan teknis. Aktor pemberdayaan juga berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus serta anggota Gapoktan.

3. Program dan Kegiatan Pemberdayaan

Program dan Kegiatan dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, yang tertulis dalam Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2011-2015. Desa Asmorobangun sebelum Tahun 2014 telah mendapatkan dan melaksanakan program yaitu

program prima tani dan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Setiap tahun Desa Asmorobangun juga menerapkan program dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Puncu sesuai sasaran yang akan dicapai.

4. Dukungan Anggaran, SDM, dan Sarana Produksi

Sumber anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan pemberdayaan di Desa Asmorobangun berasal dari APBN, APBD, dan berasal dari sumber daya lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan usaha petani di dukung dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bersumber dari Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Dukungan sumber daya manusia untuk mendukung pemberdayaan masih kurang sebab hanya terdapat seorang penyuluh untuk Desa

Asmorobangun, dan sumber daya manusia petani masih rendah sebab anggota gapoktan hanya terdapat 70 orang atau 24% berpendidikan SMA sederajat dan berpendidikan Sarjana hanya 8 orang atau 2,8%. Dukungan sarana produksi yang dimiliki oleh masyarakat maupun Gapoktan berasal dari bantuan pemerintah dan ada yang diadakan oleh kelompok tani sendiri dari hasil usaha tani.

5. Capaian Hasil Pemberdayaan dalam Pertanian Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan di Desa Asmorobangun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari usaha tani yang telah dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai yaitu perubahan mindset petani untuk menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan dengan pupuk anorganik, mampu mengolah limbah pertanian dan limbah ternak menjadi pupuk bokashi atau organik, dapat mengelola Dana PUAP hingga berkembang dan menjadi Juara 1

Tingkat Provinsi, mampu mengadakan sarana produksi dari hasil usaha tani kelompok tani. Capaian dari pemberdayaan juga memberikan dampak pada aspek pertanian yang terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Aspek ekonomi memberikan dampak bahwa petani dapat menekan biaya produksi pertanian dengan menggunakan pupuk organik yang diproduksi oleh Gapoktan dan kelompok tani, masalah ekonomi atau permodalan masyarakat terbantu dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM), wanita tani dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan sehingga dapat meningkatkan pemasukan. Aspek lingkungan, petani sudah mengurangi penggunaan pupuk organik untuk lahan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah, pemanfaatan limbah pertanian dijadikan pakan ternak dapat lebih bermanfaat sehingga tidak terbuang sia-sia dan mengotori lingkungan. Aspek sosial, rasa kepedulian sosial masyarakat diwujudkan dengan didirikannya pusat pelatihan pertanian pedesaan swasdaya yang bertujuan untuk memberikan pelatihan pertanian kepada masyarakat tentang pertanian, Gapoktan juga memperhatikan lingkungan sosial dengan menyisihkan sebagian keuntungan usahasebesar 5% yang digunakan untuk dana social dan dana pendidikan, Kandang komunal sapi milik kelompok tani dapat menyerap tenaga kerja sebab jumlah ternak sapi yang banyak sehingga diperlukan orang yang merawat dengan sistem bagi hasil sehingga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk petani Desa Asmorobangun dalam mengatasi kemiskinan. Dana PUAP yang dihibahkan kepada Gapoktan dapat dimanfaatkan sebagai dengan memberikan pinjaman modal dan memiliki kewajiban mengembalikan setelah panen sesuai ketentuan, selain itu pemerintah memberikan kemudahan petani untuk melakukan pinjaman ke bank dapat difasilitasi oleh Gapoktan.

Partisipasi petani pengurus dan anggota dapat merubah mindset dan perilaku untuk melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik, hal tersebut tidak lepas dari proses penyadaran, sehingga masyarakat dengan sukarela melakukan partisipasi. Sumber daya manusia penyuluh juga menjadi faktor pendukung dalam proses pemberdayaan sebab dengan sumber daya manusia yang baik dapat meyakinkan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Dukungan organisasi yang didirikan oleh petani dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengolah lahan pertaniannya yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, selain itu juga terdapat dukungan Koperasi Pertanian (Koperta), Koperasi Serba Usaha (KSU), Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dukungan sarana produksi pertanian dapat mendorong kemandirian petani/kelompok tani dengan bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dapat mendukung produksi pupuk bokashi/organik untuk pemenuhan kebutuhan petani. Terdapat dukungan pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah terdapat kios resmi penyalur pupuk bersubsidi dari pemerintah.

2. Faktor Penghambat

Penghambat dalam pemberdayaan pertanian pertanian berkelanjutan adalah masalah ketersediaan tenaga kerja dan upah yang mahal untuk mengolah lahan pertanian, dan masalah permodalan petani sebab pada musim kemarau petani tidak ada pemasukan, sedangkan pada saat musim tanam petani harus pinjam modal. Pengaruh musim juga menjadi kendala dalam aktifitas usaha tani, sebab petani Desa Asmorobangun hanya dapat bertanam dengan mengandalkan air pada musim hujan, apabila musim kemarau petani tidak dapat mengolah lahan sebab tidak terdapat air untuk lahan pertaniannya. Permasalahan petani juga dihadapi sebab terdapat kelompok tani yang kurang aktif yang mengakibatkan fungsi dari kelompok tani kurang memberikan manfaat kepada anggotanya, selain itu juga terdapat kelompok tani yang baru berdiri sehingga masih banyak belajar dalam mengelola kelompok tani. Sumber daya pendukung yang menjadi penghambat dalam pertanian berkelanjutan adalah keterbatasan penyuluh pertanian sebagai pendamping petani sebab hanya terdapat seorang penyuluh sehingga kurang fokus untuk mendampingi kelompok tani, sarana produksi pupuk bokashi hanya terdapat 3 unit dengan kepemilikan berbeda namun belum dapat memenuhi kebutuhan pupuk bokashi/organik. Produk olahan hasil pertanian yang diproduksi oleh wanita tani Desa Asmorobangun juga mengalami hambatan dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Walaupun pemerintah daerah sudah memfasilitasi pemasaran produk dengan menyelenggarakan pasar lelang belum mendapatkan hasil yang belum maksimal.

D. Kesimpulan

Pembahasan yang sudah di sajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan yang selama ini dilakukan untuk masyarakat Desa Asmorobangun dari proses pemberdayaan cukup baik, namun yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan aktor pendamping bagi petani dalam proses pemberdayaan tersebut, masyarakat pedesaan Desa Asmorobangun membutuhkan peran penyuluhan pertanian. Hasil dari pemberdayaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan belum maksimal masih terdapat hambatan. Faktor penghambat yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi dengan memaksimalkan sumber daya pendukung dan faktor-faktor pendukung yang lainnya yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. (2012) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Creswell W. John. (2012) *Research Design; pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presektif Kebijakan Publik*. Bandung,
- Alfabeta. Salikin, Karwan A. (2003) *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. (2007) *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cetakan Ke-14. Bandung,
- Alfabeta. Syafri, Wirman. (2012) *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta,
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Media Komputindo.